

**POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN  
PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA**

(Studi Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)

**SKRIPSI**

Oleh  
**ADIRIANTO**  
**NIM 10220095**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2014**

**POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN  
PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA**

(Studi Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ADIRIANTO**

**NIM 10220095**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA**

(Studi Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Juli 2014  
Penulis,



Adirianto  
NIM 10220095

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adirianto Nim: 10220095 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA**

(Studi Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)

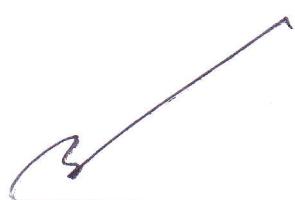
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah,



Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.  
NIP 196910241995031003

Malang, 18 Juli 2014  
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.  
NIP 197406192000031001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji skripsi saudara Adirianto, Nim 10220095, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010 dengan judul:

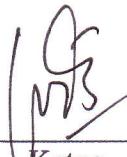
### POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

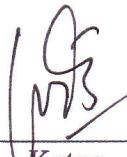
(Studi Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*Cumlaude*)

Dewan Pengaji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum  
NIP 196509041999032001



( )  
Ketua

2. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H  
NIP 197406192000031001



( )  
Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H  
NIP 197212122006041004



( )  
Pengaji Utama

Malang, 18 Juli 2014  
Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 196812181999031002

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُكُمْ كُوْنُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ  
شَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs.

Al-Maidah ayat 8)

## Kata Persembahan

يُؤْتَ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوقِّتَ خَيْرًا كَثِيرًا  
وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya ia telah mendapat kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal”.

(Q.S. Al-Baqarah: 269)

### ***Ungkapan hati sebagai rasa Terima Kasihku***

Alhamdulillahirabbil'alamin....

Aakhirnya aku sampai ke titik ini,

Sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb  
Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada\_Mu ya Rabb  
Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah Saw  
dan para sahabat yang mulia

Bapak dan Ibuku tercinta yang telah mengasuh, membimbing, menyayangi dengan segenap jiwa dan raga, setulus hati serta keteguhan hatinya untuk memperjuangkan ilmu dan pendidikan anak-anaknya.

Spesial untuk Kekasihku dan calon istriku “Evi Marcellina”, dia adalah seorang Sosok yang selalu memotivasku baik di dalam akademik maupun dalam beribadah yang dengan sabar dan penuh kasih sayang.

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terima kasih...

By: Adirianto

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Aliyy al-‘Adhîm,* dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Politik Hukum Perundang-Undangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Studi Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

*Shalawat* dan Salam kita haturkan kepada kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan hasil segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Muhammad Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Syariah terima kasih telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Pak Nashir dan Pak Nanang Masyhuri, Selaku Anggota Dewan DPR RI Jakarta yang telah meluangkan waktu untuk peneliti melakukan penelitian.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
9. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ayah (H. Amien Syarifuddin) dan Ibu (Sumarni) tercinta yang selalu memberikan dukungan, sumber semangat dan inspirasi.

11. Kekasihku tercinta Evi Marcellina yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama saya menempuh study dan sampai saat ini.
12. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada peneliti untuk memberikan informasi mengenai Pasar Modal Syariah.
13. Teman-temanku di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2010, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman PKLI Pengadilan Agama Blitar (Amalya Rosyadi, Adelia Asmawati, Farid Awwaluddin, Fachri Saleh, Muhammad Idris, Muhammad Fadhlurrahman, Ismail, Ifan Nur Hamim, Masrur Ainun Najib, dan Aminuddin) terima kasih sudah membantu selama PKLI berlangsung.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 18 Juli 2014  
Penulis,

Adirianto  
NIM 10220095

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ٍ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ء”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya قَلْ menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î      misalnya قَيْلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û      misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ئِ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

### D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرَّسْلَةُ لِلْمَدْرِسَةٍ menjadi *al-risalah li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: فِي رَحْمَةِ اللهِ menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

#### F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	8
a. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> )...	8
b. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	9
3. Jenis Bahan Hukum .....	10
a. Bahan Hukum Primer.....	10
b. Bahan Hukum Sekunder.....	10
c. Bahan Hukum Tersier .....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	11

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	12
6. Metode Analisis Bahan Hukum .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Kajian Konsep Perundang-Undangan dalam Tinjauan Politik Hukum .....</b> 20	
1. Pengertian Politik Hukum.....	20
2. Ruang Lingkup Politik Hukum Secara Umum .....	23
<b>B. Kajian Konsep Tentang Pasar Modal Syariah .....</b> 26	
1. Definisi Pasar Modal Syariah.....	26
2. Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia.....	28
3. Sejarah Pasar Modal Konvensional di Indonesia .....	31
a. Periode Permulaan (1878-1992).....	35
b. Periode Pembentukan Bursa (1912-1925).....	36
c. Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952).....	37
d. Periode Kebangkitan (1952-1976).....	39
e. Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987).....	40
f. Periode Deregulasi (1987-1995).....	42
g. Periode Kepastian Hukum (1995-Sekarang) .....	44
4. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah.....	45
<b>C. Kajian Teoritis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....</b> 47	
1. Pembentukan Undang-Undang .....	47
a. Corak Politik Perundang-Undangan .....	49
b. Tingkat Perkembangan Masyarakat.....	50
c. Pengaruh Global .....	51
d. Intervensi Asing Dalam Pembentukan Undang-	

<b>Undang .....</b>	<b>52</b>
2. Tahap Perencanaan Rancangan Undang-Undang .....	52
3. Tahap Penyusunan Rancangan Undang-Undang .....	55
4. Tahap Pembahasan Rancangan Undang-Undang.....	57
5. Tahap Pengesahan Rancangan Undang-Undang.....	61
6. Tahap Pengundangan Undang-Undang .....	63
7. Tahap Penyebarluasan Undang-Undang.....	64
8. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	66
a. Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	66
b. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 .....	67
c. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 .....	70
<b>BAB III : PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL .....</b>	<b>72</b>
A. Analisis Pembentukan Undang-Undang Pasar Modal Syariah di Tinjau dari Politik Hukum.....	72
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I Penelitian Terdahulu Mengenai Politik Hukum .....	16
Tabel II History Berkembangnya Pasar Modal di Indonesia .....	34
Tabel III Fatwa DSN-MUI Pasar Modal Syariah.....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Bukti Konsultasi
- Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian Ke DPR RI Jakarta dan Kepala Kantor  
Danareksa Cabang Malang
- Lampiran 3: Risalah Rapat Panitia Khusus Rapat Kerja Pansus Ke-1
- Lampiran 4: Pengantar Musyawarah Dari Peserta Rapat Panitia Khusus
- Lampiran 5: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Lampiran 6: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Lampiran 7: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
- Lampiran 8: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003  
Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip  
Syariah Di Bidang Pasar Modal
- Lampiran 9: Dokumen Wawancara

## **ABSTRACT**

Adirianto, Nim 10220095, **Law Politics on the Law Establishment of Sharia Capital Market in Indonesia (Study Analysis on the Establishment of Law No. 8 of 1995 Concerning Capital Market)**. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisor: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H

---

### **Keywords: Politic, Law, Sharia Capital Market**

The process or procedure of constituting a law is an activity done continuously to establish an act. It begins with the construction of an idea or ideas on the importance of a regulation to solve a problem. Then it is followed by an activity for preparing a bill done either by the People's Representative Council, The Council of Representatives of the Regions, or the government. The next process is the bills discussion by the People's Representative Council and the President to get a joint approval. After that, the bills is approved to become a law. The discussion of the bills concerning Capital Market employs two approaches. It consists of institutional and activity approach.

In the research, the research questions are: 1) how is the law politics on the law establishment of sharia capital market No. 8 1995 concerning capital market. The study is a normative research which employs library research. It uses a statute and conceptual approach. It employs content analysis to analyze the law materials.

The result of the research shows that in the establishment of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, there are two approaches employed in the bills. They are institutional and activity approach. From these two approaches, problems during the establishment of the law noted in the List of Inventory Problem to discuss later. The sociological factor of the establishment is strongly reflected by the range of the actors in the capital market, which consist of parties who have interest in the capital market and public companies.

## **ABSTRAK**

Adirianto, Nim 10220095, **Politik Hukum Perundang-Undangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Study Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H

---

### **Kata Kunci : Politik, Hukum, Pasar Modal Syariah**

---

Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan Undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan perundangan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah *content analysis*.

Hasil penelitian ini melihat terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dari pendekatan itu maka dapat masalah untuk merancang Undang-Undang tentang Pasar Modal yang sudah di tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Faktor lainnya secara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihak-pihak yang kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan publik.

## مستلخص البحث

أدرینطا، ١٠٢٢٠٩٥ . سياسة القضاء والقانون عن سوق رأس المال الإسلامي في إندونيسيا (بحث تحليلي للقانون رقم. ٨ لسنة ١٩٩٥ بشأن سوق رأس المال). البحث الجامعي. قسم الحكم الاقتصادي الإسلامي كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج.

المشرف: الدكتور الحاج مجائز كوم كيلو

### الكلمات الأساسية: السياسة، القضاء، سوق رأس المال

العمليات أو الإجراءات لصنع القانون هي مرحلة من الأنشطة التي تنفذ بشكل مستمر إلى وضع قوانين. وتبدأ هذه العملية حلال من تكوين فكرة أو أفكار حول الحاجة لتنظيم المشكلة التي ثبتت تلتها الأنشطة لإعداد مشروع التشريع من قبل مجلس النواب والمجلس الإقليمي، أو من قبل الحكومة، ثم يناقشونه حتى يجدوا الاتفاق ثم الاقرار، وتنتهي بالتشريعات. وفي بحث تأسيس قانون عن سوق رأس المال يستخدم المدخلين وهما المدخل المؤسسي والمدخل النشاط.

أما أسلمة هذا البحث ١) كيف سياسية الحكم في تأسيس القانون عن سوق رأس المال الإسلامي للقانون رقم. ٨ سنة ١٩٩٥ بشأن سوق رأس المال؟ . نوع هذا البحث هو البحث المعياري. بمدخل النهج القانوني (نحو النظام الأساسي)، والنهج المفاهيمي والنهج التاريخي. واستخدم هذا البحث التحليل المحتوى.

ونتيجة لهذا البحث هي أن تأسيس قانون رقم ٨ عن سوق رأس المال ينقسم إلى قسمين وهما المدخل المؤسسي والمدخل النشاط. ومن هذان مدخلين مشكلات لتصميم قانون سوق رأس المال التي قمت عرضها في مشاكل الجرد لإجراء المناقشة التالية في عملية تشكيل قانون سوق رأس المال. والعامل الآخر هو الاجتماعية ويجب أن يحكمها هذا القانون من جميع نواح الأطراف، أي أن لكل طرف له المصلحة مع نشاط سوق رأس المال والشركات العامة.